



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MANAJEMEN PERUBAHAN

MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

DAFTAR ISI

1. SK Nomor 41.1 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja Dan Tim Asesor Unit Kerja
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi RB Inspektorat



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 41.1 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA
DAN TIM ASESOR UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola tata pemerintahan yang baik dan menjaga kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu melakukan penataan pada sistem penyelenggaraan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait program pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja dan Tim Asesor Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja dan Tim Asesor Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan



Digital Signature
mk1363307867220304100216

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA DAN TIM ASESOR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022.**
- KESATU : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilangsungkan pada bulan Januari s.d. Desember 2022.
- KEDUA : Menetapkan susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



- KETIGA : Menetapkan susunan Tim Asesor Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Tim Asesor bertugas menilai (*assessment*) segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberi arahan garis-garis besar kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Memberi arahan dalam melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi terkait lainnya;
 3. Memberi arahan dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 5. Membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
- KELIMA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja memiliki tugas secara umum sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing;
 2. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing;
 3. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pihak terkait di unit kerja masing-masing;
 4. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing;
 5. Melaksanakan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan di unit kerja masing-masing;
 6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di unit kerja masing-masing;
 7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai pada unit kerja masing-masing di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 8. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pelaksanaan reformasi birokrasi, tim pengarah dan penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEENAM : Tim Asesor Unit Kerja memiliki tugas secara umum sebagai berikut:
1. Melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang-bidang (area perubahan Reformasi Birokrasi) yang telah ditetapkan dan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Membuat skoring hasil penilaian untuk masing-masing bidang/area perubahan tingkat unit kerja;
 3. Memberikan rekomendasi untuk rencana perbaikan pada setiap komponen area perubahan Reformasi Birokrasi dan memantau pelaksanaannya di tingkat



unit kerja;

4. Mendampingi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja pada saat dilakukan penilaian atau evaluasi eksternal oleh evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja dan Ketua Tim Asesor Unit Kerja wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selaku Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN : Keputusan ini sudah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 41.1 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
UNIT KERJA
DAN TIM ASESOR UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022**

A. PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

NO.	NAMA	JABATAN
PENGARAH		
1.	M. Guntur Hamzah	Pengarah
2.	Muhidin	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB		
1.	Teguh Wahyudi	Penanggung Jawab

B. TIM PELAKSANA UNIT KERJA YANG TERBAGI DALAM KELOMPOK KERJA

1. Kepaniteraan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Saiful Anwar	Ketua
2.	Syukri Asy'ari	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Wilma Silalahi	
4.	Rizki Amalia	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Fransisca	



6.	Mardian Wibowo	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Ria Indriyani	
8.	Yunita Rhamadani	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Anak Agung Dian Onita	

2. Biro Perencanaan dan Keuangan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Isti Widayanti	Ketua
2.	Maria Ulfah Kusumaastuti	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Renando Piany Fazardo	
4.	Budi Hari Wibowo	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Eliza	
6.	Syarief Hidayatullah Az Zaky	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Sylvia Yuliani	
8.	Yuni Nurhayati	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Windu Budiyanto	

3. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Nor Rosyid Ardani	Ketua
2.	Dede Agustina Naibaho	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Bianca Kartika Sari	
4.	Agni Rahayu	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Bianca Prakesi Talamati	
6.	Edwin Aditya Irawan	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Billy Barlian	
8.	Fithatue Amalia Fatla Aini	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Verra Yunita Mamonto	



4. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Johan Yustisianto	Ketua
2.	Dewi Hastuti	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Haifa Arief Lubis	
4.	Yohana Citra Permatasari	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Fenny Tri Purnamasari	
6.	Aqmarina Rasika	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Arinta Sulistiyo Eko P.	
8.	Syamsudin Noer	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Paulus Rudy Calvin Sinaga	

5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sri Handayani	Ketua
2.	Hasri Puspita Ainun	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Widi Atmoko	
4.	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Rizky Kurnia Chaesario	
6.	R.A. Indah Apriyanti	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Fitri Yuliana	
8.	Yossy Adriva	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Olfiziana Tri Hastuti	



6. Biro Umum

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Mundiri	Ketua
2.	Mochamad Arafah	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Achmad Junaedi	
4.	Akbar Anatajaya	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Wibisana Ferry	
6.	Ardli Nuryadi	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Ika Kurnia Aryani	
8.	Muhamad Nurtamymy	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Razi Fajari Farghani	

7. Inspektorat

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Arshinta Fitridiyani	Ketua
2.	Dhita Cantika Megatania	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Dillon Davin Zebadiah	
4.	Dian Dwi Hapsoro	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Amelia Desy Ratna Yuwita	
6.	Dwi Poesvitasari	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Muhammad Rizki	
8.	Andi Siti Chadidjah Baso	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Radityo Herdana	

8. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Yuni Sandrawati	Ketua
2.	Nerpi Juita Sinurat	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi



3.	Mohammad Mahrus Ali	Kebijakan
4.	Anna Triningsih	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Muhammad Reza Winata	
6.	Oly Viana Agustine	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Erlina Maria Christin Sinaga	
8.	Hanindyo	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Sharfina Sabila	

9. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Jefriyanto	Ketua
2.	Sri Haryanti	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Tarnoto	
4.	Riska Aprian	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Widy Hastowahyudi	
6.	Mazmur Alexander Manik	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan
7.	Jeklin Indriani Br Purba	
8.	Muhamad Aussie	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Adam Ghuzale Ramadhan	

10. Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Nanang Subekti	Ketua
2.	Ardiansyah Salim	Anggota Bidang Manajemen Perubahan dan Deregulasi Kebijakan
3.	Bangkit Panji Anarogo	
4.	Melati Kusuma Wardani	Anggota Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana
5.	Fazlur Rahman El Islamy	
6.	Santhy Kustrihardiani	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan



7.	Angga Putri Gardina	Penguatan Pengawasan
8.	Bambang Sukmadi	Anggota Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Hadian Taofik Rochman	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL
M. GUNTUR HAMZAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 41.1 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
UNIT KERJA
DAN TIM ASESOR UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM ASESOR UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022**

A. PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

NO.	NAMA	JABATAN
PENGARAH		
1.	M. Guntur Hamzah	Pengarah
2.	Muhidin	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB		
1.	Teguh Wahyudi	Penanggung Jawab

**B. TIM ASESOR UNIT KERJA UNIT KERJA YANG TERBAGI DALAM KELOMPOK
KERJA**

1. Kepaniteraan

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Panitera Muda III	Ketua
2.	Dian Chusnul Chatimah	Sekretaris



2. Biro Perencanaan dan Keuangan

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2.	Allita Prisantama	Sekretaris

3. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua
2.	Nova Ayu Pratiwi	Sekretaris

4. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Ketua
2.	Rahmadiani Putri Nilasari	Sekretaris

5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Ketua
2.	Muhammad Halim	Sekretaris

6. Biro Umum

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Biro Umum	Ketua
2.	Dewi Rahmawati	Sekretaris

7. Inspektorat

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Inspektur	Ketua
2.	Wijang Ardi Rahmadi	Sekretaris



8. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Ketua
2.	Erna Hasanah	Sekretaris

9. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ketua
2.	Muhammad Ridho Ihsan	Sekretaris

10. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN
1.	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Ketua
2.	Chafid Sugianto	Sekretaris

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL
M. GUNTUR HAMZAH



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
UNIT KERJA INSPEKTORAT
SEMESTER I TAHUN 2021**

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021**



BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan unit organisasi pelaksana tugas dan fungsi administrasi peradilan, dalam rangka memberikan dukungan administrasi umum dan justisial kepada sembilan Hakim Konstitusi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Inspektorat yang merupakan Satuan Pengawasan Intern sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan unit kerja yang melaksanakan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, baik dari sisi pengawasan administrasi umum maupun pengawasan administrasi yustisial

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintah agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masing-masing Pokja unit kerja diminta menyusun Rencana Kerja RB unit kerja yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan RB di unit kerja sepanjang tahun 2021. Rencana Kerja tersebut selain menggambarkan target waktu dan penanggung jawab atas pencapaian program kegiatan yang ditetapkan, juga menggambarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) atas pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja.

Tujuan utama dilakukannya monitoring atau pemantauan adalah menjaga agar kebijakan atau kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan dapat dengan segera dicarikan solusi atau modifikasi atas kebijakan jika terjadi kesalahan.



Tujuan utama dilakukannya evaluasi adalah sebagai alat untuk memperbaiki perencanaan, alokasi sumber dana, dan pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan di masa mendatang sehingga dapat ditingkatkan kualitasnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RB dapat dilakukan pada saat program sedang berjalan sehingga dapat segera dicarikan solusi atau jalan keluar atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2021;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 17.3 tahun 2021 tentang Tim Pelaksanaan reformasi Birokrasi Unit kerja dan Tim Assessor Unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dan sasaran dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi unit kerja Inspektorat adalah untuk peningkatan pelaksanaan RB melalui berbagai upaya perbaikan dan penyesuaian, dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan seta dalam upaya unit kerja inspektorat dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sasaran pelaksanaan monitoring evaluasi Reformasi Birokrasi Unit kerja Inspektorat tahun 2021 Semester I, adalah :



1. Memantau rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rencana kerja;
3. Mengidentifikasi hambatan atau kendala atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Tim Reformasi birokrasi Area unit kerja Inspektorat ;
4. Mengidentifikasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Refromasi Birokrasi unit kerja Inspektorat ;

IV. RUANG LINGKUP

- A. Berdasarkan keputusan Seretarias Jenderal Nomor 17.3 Tahun 2021 tentang Tim pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit kerja dan Tim Assesor Unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat jenderal mahkamah Konstitusi Tahun 2021 bahwa Tim RB unit kerja Inspektorat adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jabatan
1	Arshintia Fitri Diyani	Ketua
2	Dhita Cantika Megatania	Anggota bidang Manajemen perubahan dan penataan peraturan perundang-undangan
3	Dillon Davin Zebadiah	
4	Dian Dwi Hapsoro	Anggota Bidang Penataan dan penguatan Organisasi serta penata laksanaan
5	Amelia Desy Ratna Juwita	
6	Dwi Poespitasari	Anggota penatan Sistem Manajemen Aparatur dan penguatan pengawasan
7	Muhammad Rizki	
8	Andi Siti Chadidjah Baso	Anggota penguatan Akuntabilitas Kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik
9	Radityo Herdana	

- B. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja inspektorat meliputi seluruh area yang menjadi bagian dalam reformasi birokrasi ;

- C. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit kerja Inspektorat , yaitu:



1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
 - Evaluasi Dokumen Perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan)
 - Evaluasi Dokumen LAKIP, reviu SAKIP, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Eksternal), Survei Indeks Administrasi Umum (Internal), e-SKP, e-Kinerja;
2. Penguatan dan Pengembangan SDM dalam unit kerja Inspektorat
 - Diklat, Bimtek, sosialisasi, workshop lainnya untuk penguatan pengawasan dengan mengundang expert atau narasumber sesuai dengan kompetensinya
 - Pedoman terkait Penguatan pelaksanaan pengawasan unit kerja inspektorat
 - Pedoman lainnya terkait Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS
3. Meningkatkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - Mengelola SPIP dan APIP
 - Pengawasan terkait dengan Gratifikasi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan
 - Pembangunan Zona Integritas



BAB II
TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kemenpan RB pada unit kerja Inspektorat Tahun 2021

NO	CATATAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengoptimalkan implementasi kebijakan pengawasan Internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi , pengelolaan benturan kepentingan, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan <i>Whistle-blowing system</i> , serta memastikan seluruh fungsi apar pengawas Internal pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien	- Revisi pedoman peraturan penanganan gratifikasi , pengelolaan benturan kepentingan, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan <i>Whistle-blowing system</i> telah di susun dan dilaksanakan - pembuatan video <i>Whistle blowing system</i> telah di lakukan sehingga menjadi sarana sosialisasi bagi masyarakat dan pegawai internal Mahkamah Konstitusi



BAB II
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA INSPEKTORAT
SEMESTER I

No.	Output	Kegiatan	Semester I	Rekomendasi
1	AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN			
a	Menetapkan Role Model dan Agen perubahan dari unit kerja Inspektorat	SK penetapan Role Model dan SK Agen perubahan unit kerja Inspektorat	Belum dilaksanakan	Koordinasi dengan Unit kerja SDMO
b	Aplikasi E-Audit dan pengembangan aplikasi E-TLHP	Pengembangan Aplikasi E-Audit dan aplikasi E-TLHP	Proses di tindak lanjuti	Melakukan koordinasi dengan Pusat teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengelolaan dan fitur aplikasi
2	AREA II DEREGULASI KEBIJAKAN			
a	Peraturan pengendalian gratifikasi	Melakukan revisi atas Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi -	Proses ditindak lanjuti	Melakukan koordinasi terkait dengan
b	Peraturan WBS dan dan fitur system WBS	-Melakukan pembaharuan system WBS dan penyusunan revisi pedoman WBS -Perlu penambahan fitur Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat dan penyusunan (revisi)	Proses tindaklanjut	koordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
c	Menyusun mekanisme penanganan pengaduan terhadap pimpinan tertinggi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	SOP penanganan pengaduan Pimpinan tertinggi	Proses ditindaklanjuti	Koordinasi dengan Biro SDMO , Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK)
3	AREA III PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			



a	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi sehari hari	Laporan monitoring dan evaluasi	Sudah dilaksanakan	-
b	Pelaksanaan perampingan fungsi jabatan di unit kerja Inspektorat sehingga memiliki peran yang lebih substansial dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Dokumen analisa kebutuhan jabatan di unit kerja inspektorat	Proses tindaklanjut	Koordinasi dengan biro SDMO
c	Penyempurnaan analisa beban kerja dan analisa jabatan di unit kerja inspektorat	Dokumen analisa beban kerja	Sudah dilaksanakan	Koordinasi dengan biro SDMO
4	AREA IV PENATAAN TATALAKSANA			
a	Penyusunan peta bisnis proses yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Bisnis proses	Peta Bisnis Proses unit kerja Inspektorat	Proses tindaklanjut	Koordinasi dengan unit kerja SDMO
b	Penyempurnaan pada seluruh SOP Unit kerja Inspektorat dengan cara menginventarisir seluruh SOP yang ada di Unit kerja Inspektorat	SOP unit kerja Inspektorat	Sudah dilaksanakan	-
5	AREA V PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Unit kerja Inspektorat secara periodik	Kalender rencana diklat auditor	Telah di laksanakan	Koordinasi internal unit kerja inspektorat
2	Menyusun penilaian mandiri analisis kebutuhan kompetensi pegawai	Dokumen analisis kebutuhan kompetensi pegawai di unit kerja inspektorat	Telah di laksanakan	Koordinasi internal unit kerja insepktorat
3	Mengajukan pengusulan sertifikasi risk manajemen dan auditor di unit kerja inspektorat	Sertifikasi risk manajemen bagi auditor	Proses tindak lanjut	Koordinasi dengan instansi terkait dan dengan Unit kerja SDMO
4	Pengusulan pegawai unit kerja inspektorat sesuai dengan minat dan kompetensi untuk mengikuti program Rintisan gelar	dokumen pengusulan pegawai untuk mengikuti program rintisan gelar	Proses tindak lanjut	Koordinasi dengan Biro SDMO
6	AREA VI PENGUATAN PENGAWASAN			



1	Kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada PPNPN di Lingkungan kepaniteraan dan sekretariat Mahkamah Konstitusi	Laporan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada PPNPN di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah Konstitusi	Proses tindaklanjut Akan dilaksanakan pada semester II	Menyusun TOR dan RAB kegiatan sosialisasi pengendalian Gratifikasi kepada PPNPN di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah konstitusi
2	Penyusunan draft pedoman manajemen resiko di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi	Pedoman manajemen resiko	Telah di laksanakan	-
3	Integrasi kanal pengaduan masyarakat dengan aplikasi SP4N LAPOR KemenPAN RB	Integrasi SPAN LAPOR dengan Kementerian PAN dan RB	Telah dilaksanakan	-
4	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Mahkamah Konstitusi	Laporan pengaduan masyarakat	Telah di laksanakan	-
5	Pemetaan identifikasi benturan kepentingan di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah Konstitusi	Dokumen identifikasi benturan kepentingan	Proses	Koordinasi dengan instansi terkait (KPK atau MenPAN dan RB)
6	Monitoring pengelolaan WBS di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Telah dilaksanakan	-
7	Pelaporan LHKPN melalui media elektronik oleh pegawai unit kerja Inspektorat	Laporan LHKPN	Telah dilaksanakan	-
8	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Penetapan 3 calon unit kerja WBK/ WBBM yaitu : 2 calon unit kerja WBK (Pusat TIK dan Biro Humas dan Protokol) dan 1 calon unit kerja WBBM (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)	Telah dilaksanakan	-
9	Sosialisasi Penyebarluasan budaya anti korupsi	Video Penyebarluasan Informasi <i>Whistleblowing System</i> melalui Media Sosial	Telah dilaksanakan	-
10	Peningkatan Kompetensi Tim UPG di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mengikuti e-learning gratifikasi dengan KPK	Telah dilaksanakan	-



11	Laporan Pengelolaan Gratifikasi oleh UPG melalui elektronik	Pengelolaan Gratifikasi oleh UPG Unit Kerja Inspektorat sudah menggunakan media elektronik (SIKD)	Telah dilaksanakan	-
12	Penyempurnaan Pelaksanaan SPIP	<i>Benchmark</i> dengan BPKP dalam pelaksanaan <i>CACM (Continuous Auditing Continuous Monitoring)</i>	Telah dilaksanakan	-
13	Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Pelaksanaan Pembangunan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	4 Auditor telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang diselenggarakan BPKP	Telah dilaksanakan	-
7	AREA VII PENGUATAN AKUNTABILITAS			
a	Usulan Penyertaan Diklat Evaluasi LAKIP bagi Auditor	Diklat Evaluasi Lakip	Proses ditindaklanjuti	Koordinasi dengan biro SDMO
b	Masing masing pegawai telah melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2021	Perjanjian kinerja Unit kerja Inspektorat	Telah dilaksanakan	-
c	Penyusunan LAKIP Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2020	LAKIP Tahun 2020	Telah dilaksanakan	-
d	Monitoring laporan kinerja setiap pegawai unit kerja inspektorat	Laporan monitoring E-Kinerja	Telah dilaksanakan	-
e	Laporan penyusunan laporan Triwulan penyerapan anggaran unit kerja inspektorat	Laporan penyerapan anggaran	Telah dilaksanakan	-
8	AREA VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
a.	Menyusun Program Kerja Audit dalam setiap kegiatan Audit, Reviu, dan Monitoring sebagai wujud standart pelayanan dari Inspektorat	Program kerja Audit	Proses tindaklanjut	Penyempurnaan program kerja audit



b	Melakukan Integrasi aplikasi kanal pengaduan masyarakat dengan aplikasi pengaduan masyarakat SP4N-LAPOR! milik KemenPAN RB	Sudah terintegrasi : kanal pengaduan masyarakat berupa SP4N LAPOR! di laman MK	Telah dilaksanakan	-
---	--	--	--------------------	---



II. Progress Reformasi yang Telah Dilakukan unit kerja Inspektorat

- Salah satu capaian Reformasi birokrasi yang salah satunya adalah pembangunan Zona integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi. Kepaniteraan dan Sekretariat jenderal telah melakukan upaya upaya reformatif guna melaksanakan amanat Permenpan dan RB dimaksud, hal ini di tandai dengan ditetapkan nya Unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai unit kerja berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi), dan Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi berupaya konsisten untuk mendorong 3 unit calon WBK/WBBM dengan menetapkan 3 unit kerja yaitu ; Unit kerja Humas dan protokol, Unit kerja Pusat Tekhnologi dan Informasi untuk calon unit kerja WBK dan Unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk Calon Unit kerja WBBM .
- Penyempurnaan peraturan Sekretaris Jenderal tentang gratifikasi dan benturan kepentingan saat ini masih dalam proses penyesuaian dengan kebutuhan organisasi hal ini menjadi salah satu prioritas unit kerja inspektorat guna pencapaian penguatan pengawasan Internal .
- MK dalam hal ini unit kerja Inspektorat juga sedang mengembangkan aplikasi E-audit dan E- TLHP guna meningkatkan system audit di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi hal tersebut sejalan dengan pengelolaan SPIP system pengendalian Intern Pemerintah dalam menerapkan *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring* (CACM).
- Terobosan kebijakan dari kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah upaya pelaksanaan *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring* CACM, Inspektorat dapat melakukan pemantauan atas seluruh kegiatan di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara *real time* yang berbasis teknologi informasi.



Sehingga dengan Terbangunnya *early warning system* terkait pengelolaan keuangan dan kinerja sehingga lebih *focus* pada pengendalian preventif dan efektif, implementasi CACM data lebih mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.



BAB III PENUTUP

Kesimpulan :

1. Tim Reformasi Birokrasi unit kerja Inspektorat telah menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga sebagian besar rencana kerja Reformasi Birokrasi di Area unit kerja Inspektorat telah dilaksanakan ataupun dalam proses pelaksanaan.
2. Upaya yang dilakukan unit kerja inspektorat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan monitoring dan Evaluasi melalui media elektronik dan melakukan upaya sebagai berikut ;
 - a. Secara periodik melakukan koordinasi internal dan dengan unit kerja terkait atau dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan mutu kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - b. *UpGrade* dan *Updating* Inovasi yang terkait dengan pelaksanaan program kerja di unit kerja Inspektorat dengan melakukan *benchmark* atau study tiru kepada instansi lain.
 - c. Menetapkan rencana aksi yang sinergis dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB
3. Dalam rangka menunjang dan optimalisasi pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi , khususnya Unit kerja Inspektorat , diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Sumber Daya Manusia yang ada di unit kerja Inspektorat dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi masing masing .

Jakarta, Juli 2021

Ketua Tim unit kerja Inspektorat

Arshinta Fitri Diyani

